KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

30 Januari 2023

Nomor : 0233/I5.18/TU.00.01/2023

Hal : Undangan rapat

Yth. Seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB Mataram

Dengan hormat,

Kami informasikan bahwa Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengadakan Sosialisasi Peraturan Penegakan Disiplin PNS Berdasarkan **PP Nomor 94 Tahun 2021, Permendikbud No. 48 Tahun 2020** tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan **Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18/O/2023** tentang Kelas Jabatan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada

Hari dan tanggal : Selasa, 31 Januari 2023

tempat : Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi NTB

pukul : 08.00 Wita—selesai.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Salam takzim, Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002





KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram 83116 Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb kemdikbud go.id, Pos-el. kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

DAFTAR HADIR

SOSIALISASI PERATURAN PENEGAKAN DISIPLIN PNS, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

Hari: Selasa, 31 Januari 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Brig Any Culm	Parko Son Anha	1
	Rondeyah	Pengkaji Bahasa dan Sastra	2. Jelly
3.	Ridii Crayatri	Analis leah & replay	3. Gg
	Ni Made Yudiastini	Widyabasa Muda	4 Friw
5.	Lentera Hurani Setra	Rugkasi Bahasa Zan Jastia	5. Suf
6.	GaFoar A. Hamid	Rughasi Bahasa An Jastia Penerjemah A. Muda	
7.	Desi Rachmananati	Analis Katz dan litid	7. R.
8.	2ameam Harin		
9.	Sociadi Ependi Putra	Penerjanah Aldi PPNPN	9.
10.	Cilary Aryo Damus	Panghaji Bahasa & Sastra	10. OM
11.	M. Span, Dyal	Andir We asked	11/1/2/0



KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram 83116

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
12.	Numerati	Analis Kata Qun Istilah	12. Shuyaun
13.	Fibr Abyani	Pengadministrasian Keuanga	n 13. Fifty
14.	Kilep Mariani	Pengadministrasi leannigan	14. waxam
15.	71tik Susiawati	Pengadmintstrasi Pursumtan	15.
16.	Anton Ariestyono	Pengadmin stras Kewargan	16.
17.	Mede Ana Susante	Pengadministrax Kepegawaian	17. Ano Sugant
18.	Avs Dong Enterlan	PPMPAI	18.
19.	WAHYUN	Regal BMN	19.
20.	Ela wirm Armab	bandn	20. Fluid.
21.	Davi Joloo M	Ray Pray Anegg & Pelapon	21.
22.	Yodi sumargana	Pangelola BHN	22.
23.	1 Nyoman	Penergenich	23.



KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram 83116 Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
24.	Brug Rumb	pungadunus to perpusta lena	24. 7 Rung
25.	fahrurroz1	PPNPN	25. 3
26.	Arman Sugana	phhh	26. Peum
27.	tou expend H	pws	27. Dut
28.	Dian Fibi Mumllah	blubu	28. Dit
29.	Hartanto	Andris Isala	29 JA0
30.	Nurcholis Muslim	Widybasa	30.
31.	M. 122 intice	PPHAM	31 1 gmmg
32.	HI luh wilartini	Benduloro	32. Africano
33.	Ni Wayan Widatini	Ventikan teuangan	33. Mil
34.	Diah Rachma Yodifa	Pengelola Data	34. Yeolex
35.	Kasman	Arealis Kap Sun	Ring a



KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman kantorbahasantb kemdikbud go id, Pos-el kantorbahasantb@kemdikbud go id

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
36.	Asty Kurniawaty	Penythapi Bahasa dan Sastra	36. do
37.	M. FARUD	PPNPN	37. July
38.	Vwin 5	PARPU	38.
39.	Bain Clup Ansukmawari	PPNPN	39. July
40.	Hugalph'	PPNPN	40. June
41.	Sahnan Jumayah	PPHPH	41. Saul
42.	1 Wayan Cahegam p	PPHPH	42. Jug
43.	Puzi Petus Kardiningty	x Kepala Kanfor	43. Kung
44.			44.
45.			45.

Mengetahui,

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

Dr. Puji Retho Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

NOTULA

		NOTEEA
A.	Nama Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Penegakan Dispilin PNS, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2023
В.	Pelaksanaan	
Te	mpat	Ruang Anjani, Kantor Bahasa Provinsi NTB
	ri, Tanggal	: Selasa, 31 Januari 2023
	aktu	: 08.00 Wita—selesai
C.	Panitia Kegiatan	.; •
D.	Susunan Acara	1. Pembukaan 2. Diskusi
E.	Peserta Kegiatan	: Seluruh Pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB
F.	Topik Kegiatan yang dibahas	: Sosialisasi Peraturan Penegakan Dispilin PNS, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2023
G.	Kendala Kegiatan	
Н.	Solusi	:-
I.	Jalannya Kegiatan	: Berjalan lancar
	(1) Alat dan bahan yang diperlukan pada kegiatan	: 1. Blok Note 2. Pulpen
	(2) Uraian Kegiatan	 Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Permendikbud Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18/O/2023 tentang Kelas Jabatan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa Kegiatan sosialisasi ini diinisiasi oleh bagian kepegawaian dan Tim Penataan Manajemen SDM (Pengungkit III) ZI-WBK sebagai bagian dari fungsi pelaksanaan yang seharusnya dilakukan. Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB membuka kegiatan dan memberikan arahan untuk menyimak sosialisasi dengan baik. Beberapa hal yang disosialisasikan antara lain, yaitu kategori tingkat hukuman disiplin, klasifikasi peta jabatan yang ada di Kantor Bahasa Provinsi NTB menurut peraturan terbaru, dan kode etik pegawai yang harus selalu dijaga sesuai dengan kode etik PNS. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan disiplin dan kode etik PNS.

	6. Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB menutup kegiatan dengan memberikan motivasi kepada seluruh staf untuk meningkatkan semangat dalam bekerja, mengajak untuk tetap menjaga kekompakkan, meningkatkan kompetensi karena semua staf memiliki peluang yang sama, dan bekerja dengan cepat dan tuntas.
(3) Simpulan	Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan disiplin dan kode etik PNS

Pemimpin Kegiatan,

Dr. Puji Retno Hardininutyas, M.Hum.

Mataram, 31 Januari 2023 Notulis,

Dian Fitri Nurullah, S.Pd.

Mengetahui,

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.

NIP 198103092006042002

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PENEGAKAN DISIPLIN PNS, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU PEGAWAI





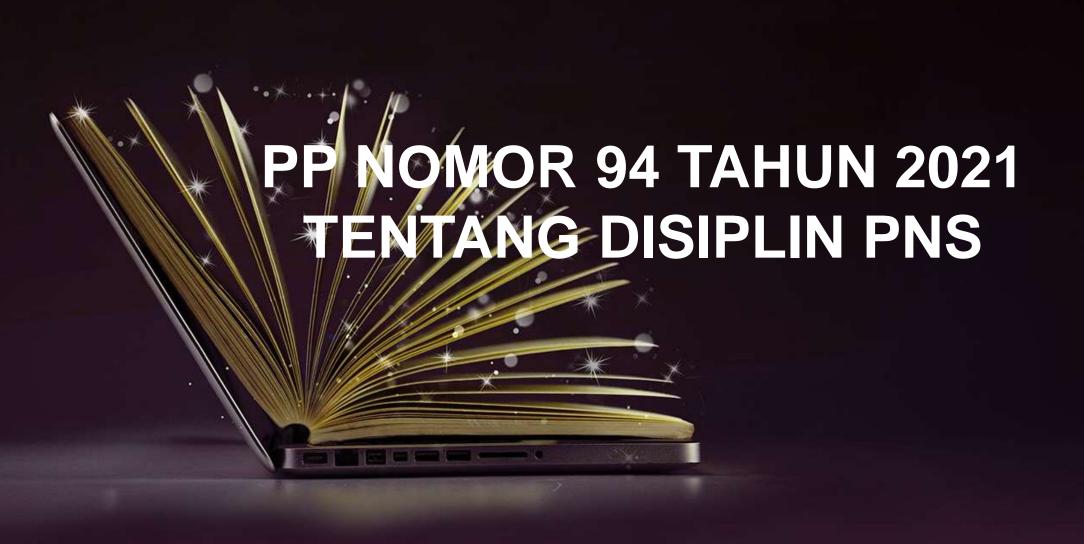






DISIPLIN PNS (PP NOMOR 94 TAHUN 2021)
KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI (PERMENDIKBUD NO 48 TAHUN 2020)
DAN
PETA JABATAN BALAI DAN KANTOR BAHASA (KEPMENDIKBUDRISTEK NOMOR 18/0/2023)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI







LATAR BELAKANG

TAHUN 99 TTG POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN
(PASAL 30)



PP NOMOR 53
TAHUN 2010 TTG
DISIPLIN PNS



PASAL 86 AYAT (4)
UU NOMOR 5 TAHUN 2014
TTG ASN



PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TTG DISIPLIN PNS

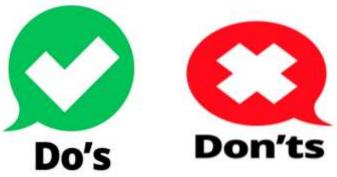
Pasal 43 PP 94 Tahun 2021 "Ketentuan PP 94/2021 mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS"

"Pasal 37 ayat (2) huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS: calon PNS diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat **sedang atau berat**"



Disiplin PNS adalah <u>kesanggupan</u> PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.



KEWAJIBAN

PASAL 3 DAN PASAL 4





LARANGAN

PASAL 5







KEWAJIBAN

PASAL 3

PNS WAJIB:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Melaksanakan kebijakan pemerintah
- d. Menaati peraturan perundang-undangan

- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan baik di dalam maupun diluar kedinasan
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh NKRI





Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:

- a. Menghadiri dan mengucap sumpah/janji PNS
- b. Mengucap sumpah/janji jabatan
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan



d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara

e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;







- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

LARANGAN



- a. Menyalahgunakan wewenang
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan



- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, LSM asing kecuali ditugaskan PPK

f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

g. melakukan pungutan di luar ketentuan;

h. melakukan kegiatan yang merugikan negara



i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan





j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan

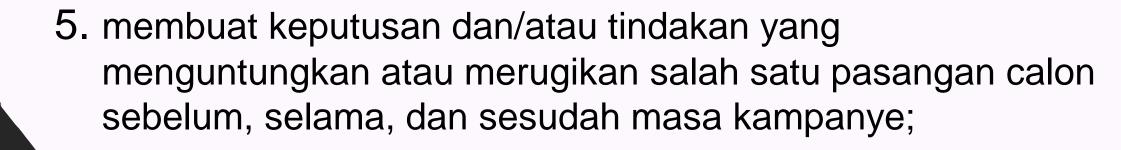
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
- I. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani





n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1. ikut kampanye
- menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
- 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
- 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara



6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN



Pasal 8 ayat (2)

- 1. Teguran Lisan
- 2. Teguran Tertulis
- **Pernyataan Tidak Puas**



ayat (3) **Pemotongan Tunkin 25%**

selama 6 bulan

1.

- **Pemotongan Tunkin 25%** 2. selama 9 bulan
- **Pemotongan Tunkin 25%** selama 12 bulan

(Saat PP Gaji Baru berlaku)

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun



- 1. Diturunkan jabatan setingkat lebih rendah 12 bulan
- 2. Dibebaskan dari jabatan menjadi pelaksana 12 bulan
- 3. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

PP 53 TAHUN 2010









TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Catatan: karena keterbatasan waktu ----→ masuk kerja Kasus lain cek tabel

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

TIPS MENEMUKAN TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f managaratis lelean intermited dan leateladon on delane ellean

Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

NO	KEWAJIBAN	TINGK	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN (Lihat Dampak)		
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1.	setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;			Pada Unit kerja, Instansi dan/atau negara	
2.	menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;		Unit kerja dan Instansi	Pada negara	
3.	melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	
4.	menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	
5.	melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	

NO	KEWAJIBAN	TINGK	KET		
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
6.	menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	
7.	menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	
8.	bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN (lihat dampak)			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
9.	menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS		Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan		
10.	menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;		Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan		
11.	mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, danf atau golongan;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara dan/atau pemerintah	
12.	melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;		Pada instansi	Pada negara dan pemerintah	

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HU	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN (Lihat Dampak)			
		RINGAN	SEDANG	BERAT		
13	melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		Pada instansi	Pada negara dan pemerintah		
14.	Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja					
15.	menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;	Pada unit kerja	Pada instansi			
16.	memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;	Pada unit kerja	Pada instansi			

NO	KEWAJIBAN	TINGK	AT HUKUMAI	N DISIPLIN	KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
17.	menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.			Tanpa batas minimal dan tanpa dasar apapun	termasuk memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun.

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMA	N DISIPLIN		NET
	Masuk kerja dan	RINGAN	SEDANG	BERAT	Catatan
	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja SANKSI LIMITATIF TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH			BERAT 21 - 24 hari kerja Diturunkan jabatan setingkat lebih rendah 12 bulan 25 - 27 hari kerja Dibebaskan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan	Catatan PP 53 Tahun 2010, hukuman disiplin sedang:

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT H	IUKUMAN E	DISIPLIN	NET
NO	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	TINGKAT H RINGAN	SEDANG	28 hari kerja atau lebih Diberhentikan dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 10 hari kerja secara terus menerus Diberhentikan	Bulan berikutnya dihentikan gaji
				dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	(Tidak perlu menunggu sk

NO	LARANGAN	TINGK	AT HUKUMAN	N DISIPLIN	KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1.	menyalahgunakanwewenang;.	-	-	✓	
2.	menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;				
3.	menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain			✓	
4.	bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;				

NO	LARANGAN	TINGK	AT HUKUMAN	I DISIPLIN	KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
5	bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;	_	_		
6	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Pada unit kerja	Pada Instansi	Pada negara dan/atau pemerintah	
7	melakukan pungutan di luar ketentuan;		Pada unit kerja dan/atau instansi	Pada negara dan/atau pemerintah	
8	melakukan kegiatan yang merugikan negara;	Pada unit kerja	Pada instansi	-	

NO	LARANGAN	TING	KAT HUKUMAN	DISIPLIN	KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
9.	bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan	Pada unit kerja	Pada instansi	-	
10.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan;	Pada unit kerja	Pada instansi	-	
11.	menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan	-	-		
12.	meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;	-	_		
13.	melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;	-	Pada Instansi	-	

NO	LARANGAN	TII	NGKAT HUKUMAN	DISIPLIN	KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
14.	memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara: 1 ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sedang 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.				



Pejabat yang berwenang menghukum

No	PJBW yg Menghukum	PJB yg Dibukum	Jenis Hokoman
1	Presiden	1. JPT Utama 2. JPT Madya yg merupakan PPK	Pasal 8 ayat (2), (3), (4)
		IPT Madya; IF Ahli Utama; Iabatan lain yg Pengangkatan dan Pemberhentiannya mjd wewenang Presiden.	Pasal 8 ayat (4) huruf c
2	PPK Pusat PPK Provinsi	1. PPT Madya	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		2. PPT Pratama	Pasal 8 ayat (3), (4)
		3. JF Ahli Utama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		4. Administrator ke bawah	Pasal 8 ayat (4)
		5. JF selain Ahli Utama	Pasal 8 ayat (4)
3	PPK Kabupaten/ Kota	1. PPT Pratama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4)
		2. JF Ahli Utama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		3. Administrator ke bawah	Pasal 8 ayat (3), (4)
		4. JF selain Ahli Utama	Pasal 8 ayat (4)

No	PYBM	PJB yg Dihukum	Jenis Hukuman
4	Kepala Perwakilan RI	PNS yg setingkat lebih rendah PNS yg 2 tingkat lebih rendah	1. Pasal 8 ayat (2) 2. PAsal 8 ayat (3)
5	PPT Madya Instansi Pusat/Provinsi	PNS yg setingkat lebih rendah PNS yg 2 tingkat lebih rendah	1. Pasal 8 ayat (2) 2. PAsal 8 ayat (3)
.6	PPT Pratama Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota atau yg setara	PNS yg setingkat lebih rendah PNS yg 2 tingkat lebih rendah Pejabat Fungsional	1. Pasal 8 ayat (2) 2. PAsal 8 ayat (3) 3. Pasal 8 ayat (2), (3),
7	Pejabat Administrator atau yg setara Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota	PNS yg setingkat lebih rendah PNS yg 2 tingkat lebih rendah Pejabat Fungsional	1. Pasal 8 ayat (2) 2. PAsal 8 ayat (3) 3. Pasal 8 ayat (2), (3),
8	Pejabat Pengawas atau yg setara Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota	PNS yg setingkat lebih rendah PNS yg 2 tingkat lebih rendah Pejabat Fungsional	1. Pasal 8 ayat (2) 2. PAsal 8 ayat (3) 3. Pasal 8 ayat (2), (3),
9	Dalam hal Tidak Terdapat Pejabat Administrator/ Pengawas pada angka 7 dan 8, Pejabat Fungsional Madya/ Muda tertentu (sepanjang ada keputusan PPK)	PNS yg setingkat lebih rendah	Pasal 8 ayat (2)

Pasal 251 PP 11 Tahun 2017

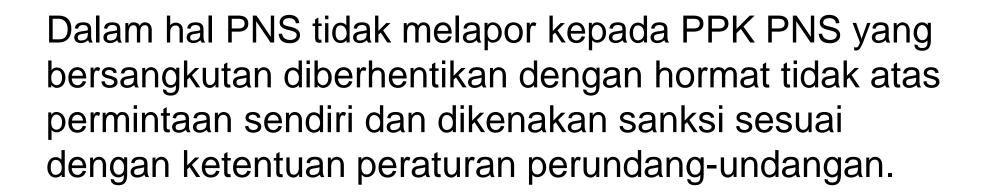
PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Catatan: PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (pemberhentian sementara dil)

Pasal 259 PP Nomor 11 Tahun 2017

PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.







PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kode Etik adalah norma dan asas yang harus dipatuhi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
- 2. Kode Perilaku adalah pedoman sikap dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Kode Etik.





Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:

- a.integritas merupakan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan serta bertindak dengan baik dan benar yang menunjukkan kewibawaan;
- b.kreatif dan inovatif merupakan kemampuan daya cipta dan/atau menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)
- c. inisiatif merupakan kemampuan untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau dituntut dalam pekerjaan;
- d. pembelajar merupakan kemampuan untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme;





- e. menjunjung meritokrasi merupakan kemampuan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai yang kompeten;
- f. terlibat aktif merupakan kemampuan untuk senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan; dan

g.tanpa pamrih merupakan kemampuan untuk bekerja dengan tulus, ikhlas, dan penuh dedikasi.







TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU

Pasal 11

- (1) Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku diperoleh dari laporan pengaduan Pegawai atau masyarakat.
- (2) Laporan pengaduan dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau diteruskan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Pelanggaran Etik dan Perilaku;
 - b. identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk dan nomor telepon/telepon seluler Pelapor;
 - c. nama, jabatan, dan/atau unit kerja Terlapor;
 - d.bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang mengetahui terjadinya Pelanggaran Etik dan Perilaku; dan
 - e. waktu dan tempat kejadian.







PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 13

Pegawai yang melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku dikenai sanksi moral dan/atau tindakan administratif.

Pasal 14

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa: a.pernyataan permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf; dan/atau

b.pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan.

(2) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibacakan secara tertutup atau terbuka.





- 3) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan, anggota Majelis Etik, Pejabat yang Berwenang, dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui:
 - a. upacara bendera;
 - b. forum resmi Pegawai;
 - c. papan pengumuman;
 - d. media massa; atau
 - e. forum lain.
- (5) Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan Sidang Etik





KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 18/0/2023

TENTANG KELAS JABATAN BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

28. Peta Jabatan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



No	Jabatan	KLS	В	K	+/-
1	Peneliti #21		0	1	~1
2	Widyabasa Ahli Muda	10	0	4	-4
3	Widyabasa Ahli Pertama	8	0	5	-5
4	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	1	-1
5	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	-1
6	Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
7	Analis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
8	Penerjemah Ahli Pertama	8	4	4	0
9	Penata Laksana Barang Terampil	7	.0	1	-1
10	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
11	Bendahara	7	1	1	0
12	Analis Kata dan Istilah	7	7	7	0
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0
14	Penyuluh Bahasa	7	0	-1	-1
15	Pengkaji Bahasa dan Sastra	7	2	0	2
16	Pengkaji Bahasa dan Sastra #4	7	3	0	3
17	Analis Bahasa dan Sastra	7	0	7	-7
18	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	- 6	1	1	0
19	Pengelola Situs atau Web	6	1	1	0
20	Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0
21	Verifikator Keuangan	6	1	1	0
22	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	0	1
23	Pengadministrasi Umum	5	0	4	-4
24	Pengadministrasi Perpustakaan	5	1	1	0
25	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	1	1	0
26	Pengadministrasi Persuratan	- 5	1	0	1
27	Pengadministrasi Keuangan	5	3	3	0
28	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	1	D	1

Delegativitad	Jumlah				
Rekapitulasi	В	K	+/-		
Pengawas	.1	1	0		
JF	4	20	-16		
Pelaksana	26	30	-4		

Keterangan

- #4 Adalah jabatan yang tidak digunakan lagi, apabila ada PNS/CPNS yang menduduki segera dipindahkan ke jabatan lain atau setelah CPNS tersebut menjadi PNS
- #21 Adalah jabatan fungsional yang saat ini ybs sedang menduduki jabatan administrasi



TERIMA KASIH